

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

3.1.1 Aspek Geografis

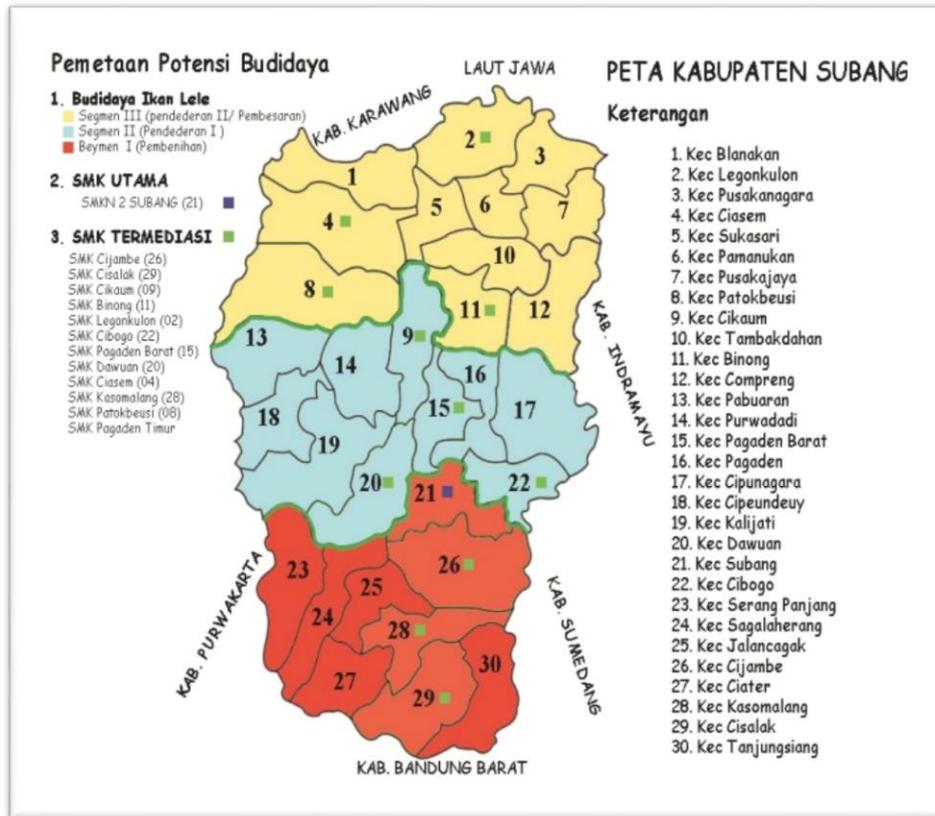
Kabupaten Subang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 02'$ - $107^{\circ} 40'$ BT dan $5^{\circ} 56'$ - $6^{\circ} 34'$ LS.

Kabupaten Subang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 – 2%, 2 – 15% dan diatas 40%. Secara administratif, Kabupaten Subang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa dataran, sedangkan bagian Utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten Subang berupa Perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat, hutan dan lokasi Pariwisata. Pada bagian tengah wilayah kabupaten Subang berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian dan pabrik-pabrik dibidang Industri, selain perumahan dan pusat pemerintahan serta instalasi militer Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten Subang berupa sawah berpengairan teknis dan tambak serta pantai.

Luas wilayah Kabupaten Subang 1.753,27 km² atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang

memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian.



Sumber: BPS Kabupaten Subang

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Subang

3.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga beli dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Adanya peningkatan jumlah penduduk akan diikuti dengan makin meningkatnya aktifitas perekonomian.

3.2 Rancangan Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan daerah (wilayah) secara sistematis dengan bantuan angka-angka yang valid dari sumber terpercaya kemudian langkah selanjutnya di lakukannya suatu analisis data untuk memecahkan persoalan yang ada.

3.2.2 Unit Analisis

Didalam pembahasan ini, unit analisis yang digunakan merupakan data time series kontribusi dari 9 sektor PDRB Kabupaten Subang dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Subang.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasionalisasi memuat beberapa penyamaan persepsi dan pengertian terhadap beberapa istilah dan variabel yang digunakan dalam studi ini, pengertian tersebut berupa:

- A. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. PDRB dimaksudkan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.
- B. Kegiatan ekonomi dalam perekonomian regional digolongkan ke dalam dua golongan yaitu kegiatan basis dan nonbasis.
- C. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.
- D. *Location Quotient* (LQ), digunakan mengetahui sektor yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing sektor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor apasaja yang termasuk dalam sektor basis
- E. *Shift-Share* Alat analisis ini digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibanding perekonomian provinsi.

F. *Typology Klassen* pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakan. Sumber data tersebut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang
2. Pusdalisbang Jawa Barat
3. BAPPEDA dan Dinas – dinas lainnya.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), perpustakaan, jurnal dan buku-buku lainnya.

3.5 PDRB Kabupaten Subang

Salah satu indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi secara makro suatu wilayah adalah dengan pendekatan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan dalam sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi makro suatu wilayah.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Subang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB juga merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk meningkatkan potensi yang ada. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Kuncoro, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 dan dinyatakan dalam juta rupiah tahun 2010 – 2015 (dalam satuan rupiah).

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan

dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Nilai PDRB Kabupaten Subang dari tahun 2010-2015 masih didominasi oleh Pertanian, Perternakan dan Kehutanan, Perdagangan ,Hotel dan Restoran. Sektor tersebut dari tahun ke tahun mempunyai peran yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Subang Tahun 2010-2014 Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta Rupiah)

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	PDRB	%	PDRB								
1	2.175.005,12	29,50	2.261.781,26	29,37	2.290.944,79	28,46	2.327.251,89	28,04	2.642.621,93	29,89	2.732.631,26
2	835.831,84	11,34	835.223,24	10,85	894.398,95	11,11	891.638,63	10,74	989.364,67	11,19	997.872,53
3	1.066.473,26	14,46	1.132.047,89	14,70	1.229.517,21	15,27	1.311.526,01	15,80	1.356.741,21	15,34	1.431.731,42
4	83.766,25	1,14	87.882,16	1,14	90.156,22	1,12	101.431,44	1,22	121.226,35	1,37	152.291,35
5	205.679,40	2,79	219.314,02	2,85	224.533,09	2,79	233.806,93	2,82	254.481,65	2,87	275.671,39
6	1.722.860,48	23,37	1.825.075,74	23,70	1.923.507,07	23,90	1.983.899,43	23,90	1.997.556,21	22,59	2.222.421,45
7	375.498,58	5,09	393.413,33	5,11	405.366,06	5,04	417.349,32	5,03	434.521,54	4,91	476.632,72
8	310.952,20	4,22	329.120,80	4,27	344.200,34	4,28	356.143,88	4,29	361.224,22	4,08	391.281,67
9	597.144,25	8,10	617.159,08	8,01	646.820,44	8,04	676.322,01	8,15	683.223,56	7,72	698.467,92
Total	7.373.211,38	100	7.701.017,52	100	8.049.444,17	100	8.299.369,54	1000	8.840.961,34	100	9.370.001,71

Sumber: BPS Kabupaten Subang

Keterangan: 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa PDRB sektor 1 (Pertanian, Perternakan, Kehutanan) di Kabupaten Subang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mempunyai sumbangan paling tinggi diantara sektor lainya dan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat nilai PDRB disetiap tahunya. Pada tahun 2010 nilai sektor 1 (Pertanian, Kehutanan, Perternakan) yaitu 2.175.005,12 pada tahun 2010, pada sektor 1 sumbangan 29,50%, dan 2.290.944,79 pada tahun 2012 dengan sumbangan 28,46%, serta 2.732.631,26 pada tahun 2015 dengan sumbangan 29,89% pada sektor 1. Kemudian nilai paling tinggi/unggul selanjutnya berada di sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran) berada diposisi kedua dengan nilai PDRB sebesar 1.722.860,48 pada tahun 2010 dengan sumbangan 23,37% pada sektor 6, dan 1.923.507,07 pada tahun 2012 dengan sumbangan 23,90%, serta 2.193.556,21 pada tahun 2014 dengan nilai sumbangan 22,59%. Sedangkan sektor 3 (Industri Pengelolaan) di posisi ketiga dari sembilan sektor PDRB, pada tahun 2010 yaitu 1.066.473,26 dengan nilai sumbangan 14,46%, dan 1.229.517,21 pada tahun 2012, serta 1.356.741,21 pada tahun 2014 dengan nilai sumbangan 15,34% pada sektor 3.

3.6 PDRB Provinsi Jawa Barat

Produk Domestik Regional Brutu merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pembangunan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2010-2015 secara umum

dapat dikatakan cenderung meningkat dari tahun ketahunya. PDRB dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksinya diwilayah (regional), kondisi geografis dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan kondisi perekonomian di

Jawa Barat dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Dengan mengetahui kontribusi persektor dapat dihitung dan diketahui sektor mana yang akan dijadikan sektor unggulan yang kompetitif (*comperatif advantage*). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah, penentuan sektor unggulan dapat diketahui dan dihitung besarnya, dan dapat disajikan arah kebijakan dan pengembangan potensi yang dimiliki. Jawa Barat sebagai penyangga perekonomian merupakan wilayah yang sangat strategis baik sektor industri pengelolaan , perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian, perterakan dan kehutan apabila dikelola dengan baik.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB juga merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk meningkatkan potensi yang ada, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki sektor-sektor potensial yang dapat di maksimalkan dengan baik antara lain sektor industri pengolahan yang bepeluang dikembangkan

dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015
Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta
Rupiah)**

Sektor	Tahun					2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
1	42.137.486,42	42.101.054,52	41.801.728,23	43.292.316,15	45.338.279,12	47.631.621,95
2	7.464.690,84	7.084.736,97	6.578.423,58	6.534.819,20	8.221.341,32	9.972.631,92
3	135.594.749,04	144.010.048,24	149.677.170,07	157.643.082,51	160.532.357,41	162.327.731,73
4	7.315.959,65	7.426.137,89	8.113.889,59	8.685.680,03	9.432.467,32	9.861.693,24
5	11.810.047,06	13.482.715,78	15.317.834,64	16.599.508,32	18.921.351,40	19.973.736,35
6	70.083.413,45	75.770.236,23	84.762.948,06	91.181.322,58	93.351.421,71	94.731.835,83
7	15.352.857,65	17.645.144,54	19.763.392,11	21.673.174,93	23.473.921,15	24.973.833,81
8	10.564.690,71	11.905.429,06	13.209.861,51	14.313.207,03	16.512.102,12	17.632.742,71
9	21.899.921,95	23.605.739,96	25.527.155,38	26.915.728,94	28.821.558,52	29.731.683,84
Total	322.223.816,77	343.031.243,19	364.752.403,17	386.838.839,69	404.604.800,07	416.837.511,38

BPS:Provinsi Jawa Barat

Keterangan: 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan pengalihan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa, 10. Total

Dari tabel 3.2 diatas terlihat bahwa PDRB sektor 3 (Industri Pengolahan) Provinsi Jawa Barat dari tahun tahun 2010 sampai tahun 2015 sektor Industri Pengolahan mempunyai nilai PDRB paling tinggi diantara sektor lainnya dan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Pada

tahun 2010 nilai sektor 3 (Industri pengolahan) yaitu 135.594.749,04 pada tahun 2010, dan 149.677.170,07 pada tahun 2012, serta 162.327.731,73 pada tahun 2015. Kemudian nilai paling tinggi/unggul selanjutnya berada di sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran) berada diposisi kedua dengan nilai PDRB sebesar 70.083.413,45 pada tahun 2010, dan 84.762.948,06 pada tahun 2012, serta 93.351.421,71 pada tahun 2014. Sedangkan sektor 1 (Pertanian, Perternakan, Kehutanan) di posisi ketiga dari sembilan sektor PDRB, pada tahun 2010 yaitu 42.137.486,42, dan 41.801.728,23 pada tahun 2012, serta 162.327.731,73 pada tahun 2015.

3.7 Kesempatan Kerja Kabupaten Subang

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang atau tenaga kerja yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini akan menyerap semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. (Disnakernas,2000). Dengan adanya ketersediaan lapangan kerja yang memadai tentu akan mempercepat proses pembangunan ekonomi apalagi disertai dengan produktivitas yang tinggi. Suatu peluang untuk mendapatkan pekerjaan diberbagai sektor ekonomi disebut dengan kesempatan kerja.

Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan

ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada melalui suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Arsyad 1999). Menurut Jhingan (2004) pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Menurut kaum klasik Adam Smith mengatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan pertumbuhan ekonomi untuk memperluas kesempatan kerja.

Besarnya kesempatan tenaga kerja untuk masyarakat adalah jumlah orang yang mengeluarkan jasanya untuk suatu proses produksi. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat, permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Sedangkan

besarnya penempatan (Jalan orang yang bekerja / Tingkat *employment*) di pengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja di pengaruhi oleh tingkat upah (**Neo Klasik**)

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tahun 2010-2014 seperti yang terlihat tabel 3.3 bahwa di Kabupaten Subang pada sektor 1 (Pertanian, Kehutanan, Perternakan) dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sektor pertanian mempunyai sumbangan penyerapan tenaga kerja paling tinggi diantara sektor lainnya dan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat disetiap tahunnya di setiap persektor. Pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja nilai sektor 1 (Pertanian, Perternakan, Kehutanan) yaitu 200.154 pada tahun 2010 dengan nilai sumbangan 31,32%, dan 261.102 pada tahun 2012 dengan nilai sumbangan 34,41%, serta 313.4231 pada tahun 2014 dengan nilai sumbangan 34,59% pada sektor 1. Kemudian nilai penyerapan tenaga kerja paling unggul selanjutnya berada di sektor 6 (Perdangan, Hotel dan Restoran) berada di posisi ke dua dari sembilan sektor yaitu 168.521 pada tahun 2010 dengan nilai sumbangan 26,29%, dan 198.546 pada tahun 2012 dengan nilai sumbangan 26,17%, serta 215.261 pada tahun 2014 dengan nilai sumbangan 23,74% pada sektor 6. Sedangkan sektor 3 (Industri pengelolaan) di posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Subang, pada tahun 2010 yaitu 90.558 dengan nilai sumbangan 14,13%, dan 104.431 pada tahun 2012, serta 345.528 pada tahun 2015 dengan nilai sumbangan 18,51 % pada sektor 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

**Jumlah Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Subang
Tahun 2010-2015 (jiwa)**

Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	PDRB	%	PDRB								
1	200.154	31,23	231.112	33,76	261.102	34,41	281.412	34,04	313.432	34,59	345.528
2	37.125	5,81	38.961	5,71	39.986	5,27	40.211	4,86	40.431	4,46	42.134
3	90.558	14,13	93.721	13,71	104.432	13,76	142.318	17,22	167.643	18,51	168.436
4	12.231	1,91	12.976	1,89	13.361	1,76	13.941	1,68	14.335	1,58	14.876
5	15.456	2,41	16.521	2,41	16.531	2,18	17.317	2,1	17.693	1,95	18.321
6	168.521	26,29	171.321	25,02	198.546	26,17	199.331	24,11	215.261	23,74	217.579
7	38.221	5,97	38.721	5,65	39.336	5,19	40.783	4,95	41.641	4,59	41.962
8	55.329	8,63	56.421	8,24	60.303	7,95	65.921	7,98	70.213	7,74	70.641
9	23.243	3,62	24.721	3,61	24.984	3,31	25.321	3,06	25.742	2,84	26.134
Total	640.838	100	684.475	3,61	758.581	100	826.555	100	906.391	100	945.611

Sumber: BPS Kabupaten Subang

Keterangan: 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan pengalihan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa

3.8 Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Barat

Jawa barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dan memiliki potensi ekonomi yang besar, kegiatan perekonomian penduduk di Provinsi Jawa Barat tidak didominasi oleh sektor tertentu, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, industri , perdagangan, dan jasa-jasa memiliki proporsi yang sama terhadap keseluruhan tenaga kerja. Sehingga Jawa barat mempunyai peran terhadap penyerapan tenaga kerja yang harus dimanfaatkan

dengan baik dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik. Meskipun demikian, apabila dilihat dari kesempatan kerja di setiap sektor perekonomian Jawa Barat digerakkan oleh sektor industri pengolahan yang memiliki peranan yang tinggi. Menurut BPS Jawa Barat apabila ditinjau berdasarkan jenis produknya, Jawa Barat didominasi oleh industri makanan, tekstil, pakaian jadi, serta barang galian bukan logam. Sementara jenis perindustrian yang memiliki rasio jumlah pekerja dibanding jumlah perusahaan paling tinggi adalah industri pakaian jadi, industri kulit dan alas kaki, industri kertas, serta industri peralatan listrik yang rata-rata setiap perusahaan mampu menyerap 300-500 pekerja dan di Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

**Jumlah Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2015**

Sektor	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	3.571.928	3.673.211	3.863.394	3.974.543	4.144.795	4.641.631
2	1.154.735	1.234.631	1.327.994	1.857.942	2.264.734	2.865.786
3	4.554.502	4.572.921	4.595.514	4.952.774	5.432.774	6.245.865
4	1.235.115	1.342.521	1.525.276	2.132.843	2.245.742	2.521.854
5	1.989.547	2.113.641	2.121.653	2.593.465	2.873.426	3.156.731
6	3.675.713	3.799.731	3.966.552	4.284.921	4.552.923	5.125.832
7	2.122.783	2.213.421	2.387.913	3.132.732	3.312.732	3.874.490
8	1.776.135	1.852.361	1.972.813	2.143.743	2.182.657	2.433.572
9	3.256.652	3.498.263	3.537.852	3.754.821	3.987.544	4.169.812
Total	23.337.110	24.300.701	25.298.961	28.827.784	30.997.327	35.035.573

Sumber: BPS Jawa Barat

Keterangan: 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan pengalihan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa, 10. Total

Dari tabel 3.8 diatas terlihat dari jumlah dan sumbangan kesempatan kerja sektor 3 (Industri Pengolahan) di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sektor Industri Pengolahan mempunyai sumbangan paling tinggi diantara sektor-sektor lainnya dan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2010 nilai sektor 3 (Industri Pengolahan) yaitu 4.554.502 pada tahun 2010, dan 4.595.514 pada tahun 2012, serta 5.432.774 pada tahun 2014. Kemudian nilai paling tinggi/unggul selanjutnya berada di sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran) berada di posisi kedua dengan nilai kesempatan kerja yaitu 3.675.713 pada tahun 2010, dan 3.966.552 pada tahun 2012, serta 4.552.923 pada tahun 2014. Kemudian sektor 1 (Pertanian, Peternakan, Kehutanan) di posisi ketiga dari sembilan sektor kesempatan tenaga kerja, pada tahun 2010 yaitu 3.571.928, dan 3.863.394 pada tahun 2012, serta 4.641.631 pada tahun 2015.

Provinsi Jawa Barat pada masa yang akan datang diharapkan menjadi suatu provinsi yang maju yang melalui pemanfaatan dari semua sektor unggulan akan mampu memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat, sehingga terwujud suatu provinsi yang mampu memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam analisis ini terdiri dari beberapa analisis, yaitu: analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift-Share*, *Tipologi Klassen*. Masing-masing metode di uraikan di bawah ini.

3.9.1 Analisis *Location Quotient (LQ)*

Metode LQ digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor nonbasis yang terdapat di suatu wilayah. Menurut Tarigan (2007) metode LQ dilakukan dengan cara membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Secara lebih rinci analisis ini membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah/daerah dengan membandingkan lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara Provinsi.

LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik ini berbagai perubah (factor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah (Adisasmita, 2005:29). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Hal ini bisa membantu dalam melihat kekuatan/kelemahan wilayah yang dibandingkan secara relative (daerah) dengan wilayah yang lebih luas (provinsi). Alat ini juga merupakan suatu teknik yang digunakan untuk

memperluas analisis *Shift-Share* dan sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif. Menurut (Stimson, et.al,2006:108) terdapat 3 tipe data untuk membantu dalam penghitungan, yaitu:

1. Mengukur tingkat (tenaga kerja, pendapatan atau PDRB)
2. Mengukur tingkat perubahan (tenaga kerja, pendapatan atau PDRB)
3. Mengukur relatif sektor terpenting (*base sektor*).

Dalam bentuk rumus, Location Quotient (LQ) adalah Robinson Tarigan, (2005):

1. Pendekatan nilai tambah (PDRB)

$$LQ = \frac{Si / S}{Ni / N}$$

Keterangan

LQ : Nilai *Location Quotitint*

Si : PDRB Sektor di Kabupaten Subang

S : PDRB total di Kabupaten Subang

Ni : PDRB Sektor di Provinsi Jawa Barat

N : PDRB total di Provinsi Jawa Barat

Dari rumus di atas diketahui bahwa:

1. $LQ > 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Produk yang dihasilkan tidak hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah saja, tetapi juga dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan wilayah lain sedangkan tingkat spesialisasinya di kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi.

2. $LQ = 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor nonbasis, karena produk yang dihasilkan hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah saja, berarti tingkat spesialisasinya di kabupaten sama di tingkat provinsi.
3. $LQ < 1$, mempunyai arti bahwa bahwa sektor tersebut merupakan sektor nonbasis, karena produk yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah, yaitu sektor yang di tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi.

Dari keterangan diatas, jika $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai perekonomian daerah.

2. Pendekatan Tenaga Kerja

$$LQ = \frac{Si / S}{Ni / N}$$

Keterangan

LQ : Nilai *Location Quotient*

Si : Tenaga Kerja Sektor di Kabupaten Subang

S : Tenaga Kerja total Kabupaten Subang

Ni : Tenaga Kerja Sektor di Provinsi Jawa Barat

N : Tenaga Kerja total di Provinsi Jawa Barat

Selain itu juga terdapat 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian, yaitu:

1. Suatu sektor dianggap basis apabila, mempunyai kaitan kebelakang (*backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) yang relatif tinggi
2. Suatu sektor dianggap sebagai sektor basis apabila menghasilkan output bruto yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan final demand yang relatif tinggi pula.
3. Suatu sektor dianggap sebagai sektor basis apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
4. Suatu sektor dianggap basis apabila mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang relatif tinggi

Teknik kuosien lokasi yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut (Nugroho, 2004) yaitu:

1. Kuosien lokasi atas dasar tenaga kerja per sektor.
2. Kuosien lokasi atas dasar PDRB
3. Kuosien lokasi atas dasar komoditi atau produksi suatu wilayah

3.9.2 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift share* adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap

struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan data sama lain yaitu (Tri Widodo, 2006: 112):

Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor-faktor penyebab perubahan sedangkan metode Shift-Share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis *Shift-Share* dapat di jelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif (Bendavid Val, 1983 dan Hoover, 1984). Kemudian Herath Janaranjana, dkk, (2011:159) dan Arsyad (1999) mengatakan analisis *Shift-Share* ini memberikan data tentang kinerja perekonomian (perubahan ekonomi) dalam 3 bidang yang saling berhubungan.

Pertumbuhan ekonomi referensi provinsi atau nasional (*national growth effect*) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. adapun formula dari pertumbuhan ekonomi referensi adalah sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

Pergeseran proporsional (*proportional shift*) menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi provinsi atau nasional Pergeseran proporsional ini disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi.

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

Pergeseran diferensial (*differential shift*) memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial positif (+) maka industri tersebut relatif tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif, $(C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n))$. Bila tiap komponen pengaruh di jumlahkan maka tanda hasil itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja/output nasional. Proportional shift component (P) atau industrial mix (M) yaitu mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi terhadap sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan begitupun dengan sebaliknya.

Different shift component (D) yaitu komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional internal. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya melimpah/efisien, akan mempunyai *differential shift* component yang positif (keunggulan kompetitif - C), begitu pula sebaliknya (Tarigan, 2005:86). Namun dibalik itu semua, analisis Shift-Share klasik ini terdapat beberapa keterbatasan, seperti :

1. Tidak mampu menjelaskan pola perilaku data karena persamaan yang ada hanya merupakan persamaan identitas.
2. Daerah di asumsikan harus tumbuh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional atau wilayah administratif di atasnya. Asumsi ini dapat menghasilkan bias karena sebab-sebab pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat dijelaskan.
3. Komponen industri mix dan differential mix atau competitiveness tidak dikembangkan dengan baik.
4. Bahwa seluruh komoditas pada suatu daerah di pasarkan secara nasional.

Menyimpulkan bahwa *Shift-Share* dinamis lebih akurat, pendekatannya yang dinamis memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengalokasikan pertumbuhan antar komponen. Komponen *Shift-Share* dinamis ini di jabarkan menjadi dua komponen yaitu komponen spesialisasi dan kompetitif (competitive). Kedua komponen ini juga disebut komponen efek alokasi (allocation effect) (Herzog dan Olsen,1977 dalam Selting Anne,1990:25).

Efek alokasi adalah komponen dalam EM-SS yang dapat menunjukkan apakah suatu daerah memiliki spesialisasi dan keunggulan kompetitif. Persamaan EM-SS memiliki komponen baru dengan mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif (Cij) dari *Shift-Share* klasik yang di sebut dengan *homothetic employment* di sektor i diwilayah j, tetapi dalam penelitian ini akan digunakan variabel PDRB sebagai pengganti *variabel employment* yang menurut Tarigan (2005) *Shift-Share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah,

kemudian apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama.

Metode analisis *Shift Share* yang merupakan alat untuk menghitung, menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian daerah ini diawali dengan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{G} &= \mathbf{Y}_{jt} - \mathbf{Y}_{j0} \\
 &= \sum (\mathbf{N}_j + \mathbf{P}_j + \mathbf{D}_j) \\
 \mathbf{N}_j &= \mathbf{Y}_{j0} (\mathbf{Y}_t / \mathbf{Y}_0) - \mathbf{Y}_{j0} \\
 (\mathbf{P} + \mathbf{D})_j &= \mathbf{Y}_{jt} - (\mathbf{Y}_t / \mathbf{Y}_0) \mathbf{Y}_{j0} \\
 \mathbf{P}_j &= \sum_i (\mathbf{Y}_{it} / \mathbf{Y}_{i0} - \mathbf{Y}_t / \mathbf{Y}_0) \mathbf{Y}_{ij0} \\
 \mathbf{D}_j &= \sum_t \mathbf{Y}_{ijt} - (\mathbf{Y}_{it} / \mathbf{Y}_{i0}) \mathbf{Y}_{ij0} \\
 &= (\mathbf{p} + \mathbf{D})_j - \mathbf{P}_j
 \end{aligned}$$

Dimana:

\mathbf{G}_j = Pertumbuhan PDRB Total Kabupaten Subang

\mathbf{N}_j = Komponen Share

$(\mathbf{P} + \mathbf{D})_j$ = Komponen Net Shift

\mathbf{P}_j = Propotional Shift Kabupaten Subang

\mathbf{D}_j = Differential Shift Kabupaten Subang

\mathbf{Y}_j = PDRB total Kabupaten Subang

\mathbf{Y} = PDRB total Jawa Barat

\mathbf{O}, \mathbf{t} = Periode awal Periode akhir

\mathbf{I} = Subsektor industri pada PDRB

Jika $P_j > 0$, maka Kabupaten analisis akan berspesialisasi pada sektor yang tingkat Provinsi tumbuh lebih cepat, Sebaliknya jika $P_j < 0$ maka Kabupaten analisis akan berspesialisasi pada sektor yang tingkat provinsi tumbuh lebih lambat.

Bila $D_j > 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten analisis lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi dan apabila $D_j < 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten analisis relatif lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama Provinsi.

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut *pansa Share*, pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah dianalisis melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional dengan variabel di daerah yang diamati, hasil perhitungan akan menggambarkan peran kabupaten yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Diharapkan bahwa apabila suatu daerah pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Secara umum nilai P_j dan D_j tidak dapat bernilai sama dengan nol, hal ini disebabkan nilai sama dengan nol menunjukkan bahwa pertumbuhan total PDRB sektor pada daerah tersebut tidak mempunyai nilai atau sama dengan nol, hal ini kemungkinan terjadinya sangat kecil karena total PDRB sektor yang bernilai nol menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan pada sektor daerah tersebut dan tidak adanya perhitungan oleh pemerintah daerah mengenai distribusi sektor terhadap daerahnya, Apabila PDRB sektor daerah tersebut nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa sektor pada daerah tersebut mengalami kelemahan.

9.9.3 Tipologi Klassen

Analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, menurut Arsyad Lincoln, 1999:323 terdapat empat klasifikasi daerah yang diamati yaitu:

Tabel 3.5

Klasifikasi Tipology Klassen

Kuadran I Maju Dan Cepat Tumbuh (<i>High Growth And High Income</i>) $Gr > g ; yt > r$	Kuadran II Berkembang (<i>High Growth But Income</i>) $Gr > g ; y < yr$
Kuadran III Maju Tapi Tertekan (<i>low Growth But High Income</i>) $Gr > g ; yr > y$	Kuadran IV Relatif Tertinggal (<i>low Growth And Low Income</i>) $Gr < g ; yt < y$

Sumber: Kuncoro, 2012

1. Kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) atau disebut juga sebagai daerah maju dan tumbuh cepat (*rapidgrowth region*), merupakan daerah yang memiliki tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.

2. Kuadran II yaitu daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*) atau juga disebut sebagai daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi
3. Kuadran III yaitu daerah maju tetapi tertekan (*low growth but high income*) atau juga disebut sebagai daerah berkembang cepat (*growing region*), merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.
4. Kuadran IV yaitu daerah tertinggal (*low growth and low income*) atau disebut juga sebagai daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi. Klasifikasi diatas kemudian dirangkum dalam Tabel seperti dibawah ini:

Tabel 3.6

Klasifikasi Daerah Menurut Analisis Tipologi Daerah

PDRB perkapita(Y) Laju Pertumbuhan(R)	$Y^i > Y$	$Y^i < Y$
$R^i > R$	DAERAH MAJU DAN TUMBUH CEPAT Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	DAERAH BERKEMBANG Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
$R^i < R$	DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	DAERAH RELATIF TERTINGGAL Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber: (Arsyad Lincoln, 1999:323).

Keterangan: R^i = Laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota i

Y^i = PDRB perkapita daerah kabupaten/kota i

R = Laju pertumbuhan ekonomi daerah referensi/provinsi

Y = PDRB perkapita daerah referensi/provinsi